

Interim Report Studi Peradilan Pilkada 2015

Darurat Keadilan Pilkada, Jokowi Perlu Keluarkan Perppu!

Jakarta, 4 Januari 2016

1. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 1/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan elektoral pada perselisihan sengketa hasil pilkada serentak 2015.
2. Pasal 158 UU 8/2015 menentukan bahwa permohonan dianggap memenuhi syarat jika selisih maksimal dengan pemenang yang memperoleh suara terbanyak tidak melampaui batas 0,5%-2%, tergantung jumlah penduduk di daerah pemilihan masing-masing. Ketentuan selisih maksimal sebagai syarat formil sengketa pilkada, di lapangan telah menjadi pemicu kecurangan yang serius. Sejumlah kandidat menggunakan segala cara untuk memenangi Pilkada dengan target melampaui selisih maksimal sebagaimana ditentukan Pasal 158. Pilihan berbuat curang adalah yang paling efektif untuk memenangi pilkada, apalagi sebagaimana dinyatakan oleh Ketua MK, bahwa MK tidak lagi memeriksa kecurangan pilkada, sekalipun terdapat kecurangan yang memenuhi syarat terstruktur, sistematis, dan massif.
3. MK sudah pernah menguji Pasal 158 terkait batas maksimal selisih sebagai syarat formil dan menyatakan bahwa Pasal *a quo*, sebagaimana dalam Putusan No. 51/PUU-XIII/2015 adalah konstitusional, meski tanpa argumen konstitusional memadai. Dengan demikian, tidak ada ruang yang bisa menjadi argumen MK untuk kembali membuka kran lebar bagi sengketa pilkada tanpa batasan selisih yang *rigid*. Jika, MK mengabaikan Pasal 158 maka MK akan dianggap tidak konsisten dan bahkan melanggar hukum, karena tidak mematuhi UU dan tidak mematuhi putusan yang dibuatnya sendiri saat menguji Pasal 158.
4. Mahkamah Konstitusi telah menerima 147 permohonan sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berasal dari 132 daerah terdiri dari: 117 kabupaten, 9 kota, dan 6 provinsi. Terdapat 3 kabupaten dengan 3 Pemohon yang berbeda, yakni: Kabupaten Waropen, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Nabire. Sementara, terdapat 8 kabupaten dan 1 kota dengan 2 Pemohon yang berbeda, yakni: Maluku Barat Daya, Kaimana, Gorontalo, Banggai, Boven Digoel, Teuk Bintuni, Halmahera Barat, Pematang dan Kota Tangerang Selatan.

5. Dari 147 permohonan tersebut, mengacu pada Pasal 158 UU 8/2015, MK diperkirakan hanya akan memeriksa pokok permohonan dari 24 Permohon. Sisanya, 123 permohonan, termasuk 6 permohonan perselisihan gubernur dari 6 provinsi, akan terhenti pada tahap sidang pendahuluan atau perbaikan permohonan, karena MK akan menyatakan tidak dapat diterimakarena tidak memenuhi syarat formil Pasal 158 UU 8/2015. Sejumlah 6 (enam) permohonan sengketa pemilihan gubernur dari 6 (enam) propinsi, dipastikan tidak diterima oleh MK.

Tabel 1:

**24Permohonan yang Memenuhi Syarat Formil
Berdasarkan Pasal 158 UU 8/2015**

No	Nomor Permohonan	Kab/Kota/Prov	Batas Selisih Maksimal	Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
1	21/PAN/PHP/BUP/2015	Pelalawan	1,5%	1,14%
2	23/PAN/PHP/BUP/2015	Kuantan Singingi	1,5%	0,21%
3	28/PAN/PHP-BUP/2015	Pesisir Barat	2%	1,34%
4	29/PAN/PHP-BUP/2015	Mahakam Ulu	2%	1,62%
5	37/PAN/PHP-BUP/2015	Banggai Laut	2%	1,55%
6	42/PAN/PHP-BUP/2015	Wakatobi	2%	1,38%
7	49/PAN/PHP-BUP/2015	Batanghari	1,5%	1,33%
8	54/PAN/PHP-BUP/2015	Barru	2%	0,81%
9	56/PAN/PHP-BUP/2015	Rokan Hulu	1%	0,58%
10	57/PAN/PHP-BUP/2015	Kapuas Hulu	2%	1,46%
11	59/PAN/PHP-BUP/2015	Gorontalo	1,5%	0,5%
12	63/PAN/PHP-BUP/2015	Buton Utara	2%	1,97%
13	67/PAN/PHP-BUP/2015	Gorontalo	1,5%	0,66%
14	72/PAN/PHP-BUP/2015	Kepulauan Sula	2%	0,35%
15	73/PAN/PHP-BUP/2015	Bangka Barat	2%	0,3%
16	76/PAN/PHP-BUP/2015	Musi Rawas	1,5%	1,11%
17	82/PAN/PHP-BUP/2015	Pekalongan	1%	1%
18	83/PAN/PHP-BUP/2015	Solok Selatan	2%	0,66%
19	114/PAN/PHP-BUP/2015	Manggarai	1,5%	1,28%
20	115/PAN/PHP-BUP/2015	Muna	2%	0,25%
21	116/PAN/PHP-BUP/2015	Halmahera Barat	2%	0,85%
22	119/PAN/PHP-BUP/2015	Teluk Bintuni	2%	0,54%
23	123/PAN/PHP-BUP/2015	Maluku Barat Daya	2%	1,38%
24	131/PAN/PHP-BUP/2015	Waropen	2%	1,75%

6. Selain itu, terdapat 6 permohonan yang memiliki selisih tipis dengan antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan pasangan calon kedua, yaitu: Kabupaten Halmahera Selatan (2,07%), Pegunungan Bintang (2,88), Kotabaru (3,27), Sorong Selatan (3,48%), Halmahera Utara (3,8), dan Nias Selatan (5%).

Tabel 2:
6 Permohonan dengan Selisih $\leq 5\%$

No.	Nomor Permohonan	Kab/Kota/Prov	Batas Selisih Maksimal	Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
1	20/PAN/PHP/BUP/2015	Kotabaru	1,5%	3,27%
2	66/PAN/PHP-BUP/2015	Nias Selatan	1,5%	5%
3	92/PAN/PHP-BUP/2015	Pegunungan Bintang	2%	2,88%
4	97/PAN/PHP-BUP/2015	Halmahera Selatan	2%	2,07%
5	120/PAN/PHP-BUP/2015	Halmahera Utara	2%	3,80%
6	122/PAN/PHP-BUP/2015	Sorong Selatan	2%	3,48%

7. Dalam situasi yang demikian, untuk memastikan hak konstitusional warga dan terbitnya keadilan elektoral, **ada dua pilihan yang bisa ditempuh untuk mengatasi kebuntuan akses keadilan elektoral**, yaitu:
- a. MK didorong untuk mengabaikan ketentuan batas selisih maksimal dan menjadikan variabel adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) sebagai penentu formil dapat atau tidaknya permohonan diterima. Sebaliknya, sepanjang indikasi kecurangan TSM itu tidak mengemuka, maka MK dapat mengabaikan permohonan sengketa. Namun, pilihan MK ini juga mengandung risiko, karena MK akan dianggap melakukan pelanggaran Pasal 158 UU 8/2015.

Dengan konstruksi peradilan Pilkada sebagaimana UU 8/2015, proses Pilkada sesungguhnya hanya mengutamakan aspek formil yang dipastikan gagal memperoleh kebenaran materiil yang dapat menciptakan keadilan elektoral. Mahkamah Konstitusi diingatkan untuk melihat kembali Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 yang memutus sengketa hasil Pilkada di Jawa Timur 2008, yang pada intinya adalah bahwa MK melakukan penafsiran ekstensif sehingga bisa memeriksa berbagai kecurangan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara. Setara Institute mendorong MK untuk kembali membuat

terobosan sehingga tidak menjadi bagian institusi yang melembagakan ketidakadilan Pilkada. Terobosan MK akan menjawab darurat keadilan pilkada, pelanggaran hak konstitusional warga, dan memperkuat integritas pilkada.

- b. Pilihan kedua adalah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Permerintah (Perppu) yang pada intinya menghapus syarat formil pada Pasal 158 UU 8/2015. Dan, MK tinggal mematuhi Perppu tersebut tanpa melakukan pelanggaran hukum. Dasar penerbitan Perppu yang utama adalah potensi hilangnya keadilan elektoral di 123 daerah pemilihan kepala daerah. Jokowi masih mempunyai waktu untuk mengambil langkah penyelamatan darurat peradilan pilkada.
8. Konstruksi sistem peradilan pilkada sebagaimana diatur dalam UU 8/2015 dipastikan gagal memberikan keadilan elektoral, tidak memperkuat legitimasi kepemimpinan hasil pilkada, dan tidak meyakinkan publik sebagai pemangku hak dalam berdemokrasi. Publik di daerah pemilihan tidak teryakinkan oleh hasil pilkada yang tidak bisa diobyektivikasi sepenuhnya oleh sistem peradilan Pilkada.

Kontak Person:

Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute & Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, **08111884787**.

Inggrit Ifani, Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, **081281803303**

Tabel 3:
Daftar Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada

No.	Nomor Permohonan	Kab/Kota/Prov	Batas Selisih Maksimal	Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
1	1/PAN/PHP-BUP/2015	Labuhan Batu Selatan	1,5%	23,51%
2	2/PAN/PHP/KOT/2015	Medan	0,50%	43,36%
3	3/PAN/PHP/BUP/2015	Ogan Komering Hulu	1,5%	21,78%
4	4/PAN/PHP/BUP/2015	Tana Tidung	2%	14,7%
5	5/PAN/PHP/BUP/2015	Konawe Utara	2%	2,12%
6	6/PAN/PHP/KOT/2015	Gunungsitoli	2%	11,28%
7	7/PAN/PHP/BUP/2015	Labuhanbatu	1%	2,25
8	8/PAN/PHP/BUP/2015	Tanah Bumbu	1,5%	59,40%
9	9/PAN/PHP/BUP/2015	Serdang Bedagai	1%	25,5%
10	10/PAN/PHP/KOT/2015	Sibolga	2%	10,24%
11	11/PAN/PHP/BUP/2015	Mamuju	1,5%	22,33%
12	12/PAN/PHP/BUP/2015	Bungo	1,5%	17,88%
13	13/PAN/PHP/BUP/2015	Nias	2%	12,6%
14	14/PAN/PHP/BUP/2015	Lima Puluh Kota	1,5%	8,26%
15	15/PAN/PHP/BUP/2015	Ogan Ilir	1,5%	6,06%
16	16/PAN/PHP/BUP/2015	Berau	2%	15,12%
17	17/PAN/PHP/KOT/2015	Balikpapan	1%	9,61%
18	18/PAN/PHP/BUP/2015	Indragiri Hulu	1,5%	16,42%
19	19/PAN/PHP/BUP/2015	Kota Waringin Timur	1,5%	36,11%
20	20/PAN/PHP/BUP/2015	Kotabaru	1,5%	3,27%
21	21/PAN/PHP/BUP/2015	Pelalawan	1,5%	1,14%
22	22/PAN/PHP/BUP/2015	Rejang Lebong	1,5%	3,43%
23	23/PAN/PHP/BUP/2015	Kuantan Singingi	1,5%	0,21%
24	24/PAN/PHP/KOT/2015	Tangerang Selatan	0,5%	27,44%
25	25/PAN/PHP/KOT/2015	Bandar Lampung	0,5%	75,33%
26	26/PAN/PHP-BUP/2015	Toba Samosir	2%	9,01%
27	27/PAN/PHP-BUP/2015	Kutai Timur	1,5%	5,63%
28	28/PAN/PHP-BUP/2015	Pesisir Barat	2%	1,34%
29	29/PAN/PHP-BUP/2015	Mahakam Ulu	2%	1,62%
30	30/PAN/PHP-BUP/2015	Gresik	0,5%	42,98%
31	31/PAN/PHP-BUP/2015	Malang	0,5%	7,14%
32	32/PAN/PHP-BUP/2015	Samosir	2%	9,01%

No.	Nomor Permohonan	Kab/Kota/Prov	Batas Selisih Maksimal	Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
33	33/PAN/PHP-BUP/2015	Bengkulu Selatan	2%	3,92%
34	34/PAN/PHP-BUP/2015	Ponorogo	1%	2,57%
35	35/PAN/PHP-BUP/2015	Supiori	2%	4,68%
36	36/PAN/PHP-BUP/2015	Tanah Datar	1,5%	9,48%
37	37/PAN/PHP-BUP/2015	Banggai Laut	2%	1,55%
38	38/PAN/PHP-BUP/2015	Boven Digoel	2%	14,59
39	39/PAN/PHP-BUP/2015	Lebong	2%	4,07%
40	40/PAN/PHP-BUP/2015	Pemalang	0,5%	10,51%
41	41/PAN/PHP-BUP/2015	Muko Muko	2%	15,7%
42	42/PAN/PHP-BUP/2015	Wakatobi	2%	1,38%
43	43/PAN/PHP-BUP/2015	Karangasem	1,5%	10,82%
44	44/PAN/PHP-BUP/2015	Bengkalis	1%	18,37%
45	45/PAN/PHP-BUP/2015	Pulau Taliabu	2%	11,96%
46	46/PAN/PHP-BUP/2015	Humbang Hasundutan	2%	2,7
47	47/PAN/PHP-BUP/2015	Toli Toli	2%	6,5%
48	48/PAN/PHP-BUP/2015	Sragen	1%	2,92%
49	49/PAN/PHP-BUP/2015	Batanghari	1,5%	1,33%
50	50/PAN/PHP-BUP/2015	Sumenep	0,5%	1,64%
51	51/PAN/PHP-KOT/2015	Sungai Penuh	2%	13,14%
52	52/PAN/PHP-BUP/2015	Pandeglang	0,5%	49,9%
53	53/PAN/PHP-BUP/2015	Merauke	2%	21%
54	54/PAN/PHP-BUP/2015	Barru	2%	0,81%
55	55/PAN/PHP-BUP/2015	Nias	2%	12,6%
56	56/PAN/PHP-BUP/2015	Rokan Hulu	1%	0,58%
57	57/PAN/PHP-BUP/2015	Kapuas Hulu	2%	1,46%
58	58/PAN/PHP-BUP/2015	Karimun	2%	62,44%
59	59/PAN/PHP-BUP/2015	Gorontalo	1,5%	0,5%
60	60/PAN/PHP-BUP/2015	Ketapang	1%	1,21%
61	61/PAN/PHP-KOT/2015	Ternate	2%	5,68%
62	62/PAN/PHP-BUP/2015	Situbondo	1%	9,58%
63	63/PAN/PHP-BUP/2015	Buton Utara	2%	1,97%
64	64/PAN/PHP-BUP/2015	Banggai	1,5%	4,44%
65	65/PAN/PHP-BUP/2015	Pangkajene Kepulauan	1,5%	3,84%

No.	Nomor Permohonan	Kab/Kota/Prov	Batas Selisih Maksimal	Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
66	66/PAN/PHP-BUP/2015	Nias Selatan	1,5%	5%
67	67/PAN/PHP-BUP/2015	Gorontalo	1,5%	0,66%
68	68/PAN/PHP-BUP/2015	Humbang Hasundutan	2%	2,7
69	69/PAN/PHP-BUP/2015	Banggai	1,5%	4,44%
70	70/PAN/PHP-BUP/2015	Kepulauan Meranti	2%	12,18%
71	71/PAN/PHP-BUP/2015	Jember	0,5%	7,52%
72	72/PAN/PHP-BUP/2015	Kepulauan Sula	2%	0,35%
73	73/PAN/PHP-BUP/2015	Bangka Barat	2%	0,3%
74	74/PAN/PHP-BUP/2015	Siak	1,5%	19,2%
75	75/PAN/PHP-BUP/2015	Manggarai Barat	1,5%	3,81
76	76/PAN/PHP-BUP/2015	Musi Rawas	1,5%	1,11%
77	77/PAN/PHP-KOT/2015	Tangerang Selatan	0,5%	27,44%
78	78/PAN/PHP-BUP/2015	Nabire	2%	2,8%
79	79/PAN/PHP-BUP/2015	Cianjur	0,5%	3,3%
80	80/PAN/PHP-BUP/2015	Nabire	2%	2,8%
81	81/PAN/PHP-BUP/2015	Boven Digoel	2%	14,59
82	82/PAN/PHP-BUP/2015	Pekalongan	1%	1%
83	83/PAN/PHP-BUP/2015	Solok Selatan	2%	0,66%
84	84/PAN/PHP-BUP/2015	Poso	2%	7,24%
85	85/PAN/PHP-BUP/2015	Indramayu	0,50%	11,90%
86	86/PAN/PHP-BUP/2015	Hulu Sungai Tengah	2%	25,54%
87	87/PAN/PHP-BUP/2015	Rokan Hilir	1%	10,71%
88	88/PAN/PHP-BUP/2015	Mamberamo Raya	2%	3,13
89	89/PAN/PHP-BUP/2015	Nabire	2%	2,8%
90	89/PAN/PHP-BUP/2015	Raja Ampat	2%	10%
91	91/PAN/PHP-BUP/2015	Bulukumba	1,5%	2,47%
92	92/PAN/PHP-BUP/2015	Pegunungan Bintang	2%	2,88%
93	93/PAN/PHP-BUP/2015	Sigi	2%	3,77%
94	94/PAN/PHP-BUP/2015	Konawe Kepulauan	2%	15,5%
95	95/PAN/PHP-BUP/2015	Wonosobo	1%	19,18%
96	96/PAN/PHP-BUP/2015	Pahuwato	2%	35,64%
97	97/PAN/PHP-BUP/2015	Halmahera Selatan	2%	2,07%
98	98/PAN/PHP-BUP/2015	Seram Bagian Timur	2%	10,22%
99	99/PAN/PHP-GUB/2015	Kalimantan Utara	2%	6,54

No.	Nomor Permohonan	Kab/Kota/Prov	Batas Selisih Maksimal	Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
100	100/PAN/PHP-BUP/2015	Yalimo	2%	BLM
101	101/PAN/PHP-BUP/2015	Tasikmalaya	0,5%	34,7%
102	102/PAN/PHP-BUP/2015	Keerom	2%	5,65%
103	103/PAN/PHP-BUP/2015	Manokwari Selatan	2%	41,22%
104	104/PAN/PHP-BUP/2015	Humbang Hasundutan	2%	2,7
105	105/PAN/PHP-BUP/2015	Minahasa Selatan	2%	37,23%
106	106/PAN/PHP-KOT/2015	Tomohon	2%	7,11%
107	107/PAN/PHP-BUP/2015	Minahasa Utara	2%	2,54%
108	108/PAN/PHP-BUP/2015	Morowali Utara	2%	4,13%
109	109/PAN/PHP-BUP/2015	Pemalang	0,5%	10,51%
110	110/PAN/PHP-BUP/2015	Kutai Barat	2%	8,3%
111	111/PAN/PHP-BUP/2015	Teluk Bintuni	2%	0,54%
112	112/PAN/PHP-GUB/2015	Bengkulu	2%	14,70%
113	113/PAN/PHP-GUB/2015	Kepulauan Riau	2%	6,48%
114	114/PAN/PHP-BUP/2015	Manggarai	1,5%	1,28%
115	115/PAN/PHP-BUP/2015	Muna	2%	0,25%
116	116/PAN/PHP-BUP/2015	Halmahera Barat	2%	0,85%
117	117/PAN/PHP-BUP/2015	Melawi	2%	11,6%
118	118/PAN/PHP-BUP/2015	Kepulauan Selayar	2%	9,02%
119	119/PAN/PHP-BUP/2015	Teluk Bintuni	2%	0,54%
120	120/PAN/PHP-BUP/2015	Halmahera Utara	2%	3,80%
121	121/PAN/PHP-BUP/2015	Waropen	2%	1,75%
122	122/PAN/PHP-BUP/2015	Sorong Selatan	2%	3,48%
123	123/PAN/PHP-BUP/2015	Maluku Barat Daya	2%	1,38%
124	124/PAN/PHP-BUP/2015	Halmahera Barat	2%	0,85%
125	125/PAN/PHP-BUP/2015	Gowa	1%	14,84%
126	126/PAN/PHP-BUP/2015	Asmat	2%	BLM
127	127/PAN/PHP-BUP/2015	Kaimana	2%	BLM
128	128/PAN/PHP-BUP/2015	Tapanuli Selatan	1,5%	38,45%
129	129/PAN/PHP-GUB/2015	Sumatera Barat	1,50%	17,14%
130	130/PAN/PHP-BUP/2015	Waropen	2%	1,75%
131	131/PAN/PHP-BUP/2015	Waropen	2%	1,75%
132	132/PAN/PHP-GUB/2015	Sulawesi Tengah	1,50%	9,04%
133	133/PAN/PHP-BUP/2015	Sumba Timur	2%	9,7%

No.	Nomor Permohonan	Kab/Kota/Prov	Batas Selisih Maksimal	Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
134	134/PAN/PHP-GUB/2015	Sulawesi Utara	1,50%	20,40%
135	135/PAN/PHP-BUP/2015	Yahukimo		belum masuk
136	136/PAN/PHP-BUP/2015	Pasaman	1,50%	0,98%
137	137/PAN/PHP-BUP/2015	Buru Selatan	2%	19,74%
138	138/PAN/PHP-BUP/2015	Mamuju Utara	2%	22,33%
139	139/PAN/PHP-BUP/2015	Maluku Barat Daya	2%	1,38%
140	140/PAN/PHP-BUP/2015	Kaimana	2%	belum masuk
141	141/PAN/PHP-BUP/2015	Kepulauan Aru	2%	13,64
142	142/PAN/PHP-BUP/2015	Solok	1,50%	9,65
143	143/PAN/PHP-BUP/2015	Sekadau	2%	5,37
144	144/PAN/PHP-BUP/2015	Bone Bolango	2%	7,1
145	145/PAN/PHP-BUP/2015	Dompu	2%	9,44
146	146/PAN/PHP-BUP/2015	Manokwari	2%	14,4
147	147/PAN/PHP-BUP/2015	Tidore Kepulauan	2%	8,93

Sumber Data: KPU dan Mahkamah Konstitusi